

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING TANPA RUANG KHUSUS DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SISWA DI SD NEGERI BALIREJO YOGYAKARTA

Maria Helena Wenehenubun¹, Jumintono², Saryanto³

¹²³Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia

Corresponden E-Mail; ellenawenehnebun010303@gmail.com

ABSTRAK

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Namun, sebagian besar sekolah dasar di Indonesia belum memiliki ruang konseling khusus. SD Negeri Balirejo Yogyakarta, sebagai sekolah inklusi, menghadapi kondisi ini secara nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan layanan BK tanpa ruang khusus dalam mengatasi permasalahan siswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan angket daring kepada 19 siswa kelas III–VI. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BK dilaksanakan secara fleksibel, yaitu di ruang guru untuk kasus ringan dan ruang kepala sekolah untuk kasus serius. Ketidaknyamanan siswa tampak dari keengganan bercerita terbuka di ruang guru yang ramai, serta rasa takut saat dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sebanyak 79% siswa menyatakan kekhawatiran terhadap kerahasiaan informasi pribadi, dan seluruh siswa (100%) setuju sekolah perlu menyediakan ruang BK khusus. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa ketiadaan ruang BK berdampak pada aspek psikologis siswa secara lebih luas. Dampak ini tidak terbatas pada siswa yang pernah mengikuti layanan BK secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan BK di SD Negeri Balirejo berjalan secara fungsional namun belum optimal secara psikologis. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memandang ruang BK sebagai kebutuhan psikologis dalam manajemen sarana pendidikan sekolah dasar inklusi.

Kata kunci: Bimbingan dan Konseling; Sekolah Dasar; Ruang BK; Efektivitas Layanan; Sekolah Inklusi

ABSTRACT

Guidance and Counseling (BK) services are an important component of the education system, yet most primary schools in Indonesia still lack a dedicated counseling room. SD Negeri Balirejo Yogyakarta, as an inclusive school, faces this condition directly. Counseling services are carried out without a dedicated room that guarantees student privacy and comfort. This study aims to analyze the effectiveness of implementing counseling services without a dedicated room in addressing student problems at SD Negeri Balirejo Yogyakarta. A descriptive qualitative approach with a case study design was used. Data were collected through semi-structured interviews, observation, documentation, and an online questionnaire, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with source triangulation. Results show that counseling services run flexibly, using the teachers' room for minor issues and the principal's office for more serious cases. However, students reported psychological discomfort due to the lack of privacy, and no structured written counseling program was found. This finding also indicates that the absence of a dedicated counseling room affects students' psychological well-being more broadly. This effect extends beyond those who have directly received counseling services. The study concludes that counseling services at SD Negeri Balirejo function adequately but are not psychologically optimal. This affirms that a counseling room is a psychological prerequisite, not merely an administrative requirement.

Keywords: Guidance And Counseling; Primary School; Counseling Room; Service Effectiveness; Inclusive School

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran di dalam kelas. Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh sejauh mana sekolah mampu mendukung perkembangan menyeluruh peserta didik, termasuk aspek pribadi, sosial, dan emosional.

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) hadir sebagai instrumen penting yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dalam konteks pendidikan nasional, BK bukan sekadar program tambahan, melainkan komponen yang diwajibkan secara regulatif. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 mewajibkan BK diselenggarakan secara terprogram, berkelanjutan, dan profesional di setiap satuan pendidikan, termasuk di jenjang sekolah dasar.

Di tingkat sekolah dasar, peran BK menjadi semakin strategis. Pada usia ini, anak berada pada fase pembentukan karakter dan pengelolaan emosi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sekolah. (Amala & Kaltsum, 2021) menegaskan bahwa peran guru sebagai pelaksana layanan BK di sekolah dasar sangat menentukan keberhasilan pembinaan karakter dan kedisiplinan peserta didik. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa layanan BK yang didukung fasilitas memadai mampu menciptakan ruang konseling yang aman, privat, dan kondusif bagi keterbukaan siswa. (Nikmarijal & Ahmad, 2023) menegaskan bahwa kenyamanan lingkungan konseling berkorelasi langsung dengan tingkat keterbukaan siswa. Dengan demikian, ruang konseling merupakan prasyarat keberhasilan proses konseling itu sendiri, bukan sekadar elemen pelengkap.

Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan wajah yang berbeda. Sebagian besar sekolah dasar di Indonesia masih menghadapi keterbatasan mendasar dalam penyelenggaraan layanan BK. Keterbatasan ini mencakup tidak adanya guru BK khusus hingga tidak tersedianya ruang konseling yang memadai. (Fadillah & Hanif, 2025) mengungkapkan bahwa fungsi BK di sekolah dasar sebagian besar dijalankan oleh guru kelas yang merangkap tugas. Guru kelas tersebut menjalankan fungsi ini tanpa dukungan fasilitas yang semestinya tersedia. (Mustika et al., 2022) menemukan bahwa ketiadaan fasilitas pendukung, terutama ruang konseling khusus, menjadi hambatan struktural. Hambatan ini secara langsung membatasi kualitas dan kedalaman layanan yang dapat diberikan kepada siswa.

Persoalan ini bukan hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi juga merupakan persoalan makro secara nasional. Data PB ABKIN yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI pada tahun 2023 menunjukkan kekurangan guru BK secara nasional. Kekurangan ini bersifat signifikan. Kekurangan ini mencapai 242.000 orang dari total kebutuhan 300.000 guru. Kekurangan ini terjadi akibat rasio guru BK terhadap siswa yang jauh dari ideal di seluruh jenjang pendidikan. Kondisi nasional ini selaras dengan gambaran keterbatasan di tingkat daerah, sebagaimana diperkuat oleh temuan (Khoeriyah, 2024) pada 16 SD/MI di Pekalongan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 93,8% sekolah tidak memiliki tenaga bimbingan dan konseling. Hanya 3 dari 16 sekolah yang memiliki ruang konseling individu maupun kelompok sesuai standar. Data ini mengindikasikan bahwa ketiadaan guru dan ruang BK bukan persoalan satu sekolah semata, melainkan pola yang berulang di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, studi-studi di atas menunjukkan tiga arah pembahasan utama dalam penelitian layanan BK di sekolah dasar. Arah pertama adalah peran guru BK dalam pembinaan karakter siswa, dan arah kedua adalah peran guru kelas dalam mengampu tugas BK (Saputra, 2022). Arah ketiga adalah optimalisasi sarana dan prasarana BK melalui kreativitas guru (Anggara & Suherman, 2024). Namun, ketiga arah pembahasan tersebut masih mengkaji satu aspek secara terpisah, yaitu peran guru, fasilitas, atau pengelolaan layanan. Belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan efektivitas layanan BK, sekolah inklusi, dan manajemen sarana prasarana pendidikan dalam satu kajian. Celah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

Karena penelitian ini secara eksplisit mengangkat isu efektivitas, kajian mengenai konsep

efektivitas organisasi menjadi penting sebagai pijakan teoretis. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1997) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi, yang diukur dari sisi individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Steers (1977) menegaskan bahwa efektivitas suatu program tidak dapat dilihat semata dari hasil akhir. Efektivitas juga perlu dilihat dari optimalisasi sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan tersebut. Campbell (1977) menambahkan bahwa efektivitas bersifat multidimensi dan dapat dinilai dari berbagai kriteria, termasuk kepuasan anggota, kualitas proses, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ketiga pandangan ini digunakan untuk membingkai efektivitas layanan BK di SD Negeri Balirejo. Efektivitas layanan tidak hanya dinilai dari terselesaikannya masalah siswa, tetapi juga dari sisi proses, sumber daya, dan pengalaman psikologis siswa selama layanan berlangsung.

Ketiadaan ruang BK khusus berdampak pada beberapa hal sekaligus. Dampak tersebut meliputi terbatasnya privasi siswa selama mengikuti layanan, terbentuknya persepsi negatif terhadap BK, serta lemahnya perencanaan dan administrasi program BK secara keseluruhan. (Saputra, 2022) menambahkan bahwa guru yang menjalankan tugas BK tanpa fasilitas memadai sering menghadapi dilema antara menjaga kerahasiaan kasus dan keterbatasan ruang yang tersedia. Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas layanan BK di sekolah dasar berstatus inklusi dalam kondisi ketiadaan ruang khusus. Padahal, kombinasi kedua kondisi ini menghadirkan kompleksitas tersendiri yang layak dikaji lebih dalam.

SD Negeri Balirejo Yogyakarta merupakan salah satu sekolah dasar yang menghadapi kondisi ini secara nyata. Sekolah ini belum memiliki ruang BK khusus, sementara berstatus sebagai sekolah inklusi yang melayani siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus secara bersamaan. Layanan BK dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang guru untuk permasalahan ringan, dan ruang kepala sekolah untuk kasus yang lebih serius. Pemilihan ruang ini bergantung sepenuhnya pada ketersediaan ruang pada saat itu. Kondisi unik ini menjadikan SD Negeri Balirejo sebagai lokasi penelitian yang representatif. Lokasi ini relevan untuk mengkaji bagaimana efektivitas layanan BK dapat dipertahankan, atau justru tergerus, dalam situasi keterbatasan fasilitas yang nyata.

Penelitian ini penting karena menyuarakan realitas yang sering diabaikan dalam perencanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yakni bahwa ruang BK bukan kemewahan melainkan kebutuhan dasar. Ruang BK menentukan kualitas layanan psikologis siswa di sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan layanan BK tanpa ruang khusus dalam mengatasi permasalahan siswa di SD Negeri Balirejo Yogyakarta. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi konkret bagi pemangku kebijakan dalam perencanaan fasilitas pendidikan ke depan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, fokus pada sekolah dasar berstatus inklusi yang menghadirkan kompleksitas layanan BK lebih tinggi dibandingkan sekolah reguler. Kedua, kajian dilakukan pada sekolah yang sama sekali belum memiliki ruang BK khusus, bukan sekadar ruang yang kurang memadai. Ketiga, penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka manajemen sarana dan prasarana pendidikan, bukan hanya dari sisi kompetensi atau peran guru BK semata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena mampu menangkap realitas pelaksanaan layanan BK secara mendalam dan kontekstual sebagaimana

adanya di lapangan. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Jenis penelitian ini memungkinkan kajian intensif dan menyeluruh terhadap kondisi layanan BK di satu lokasi secara spesifik dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Balirejo, Kota Yogyakarta, pada bulan April 2026. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan sekolah inklusi yang belum memiliki ruang BK khusus, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian. Responden penelitian terdiri atas satu orang guru BK sebagai informan utama, dan tiga siswa yang dipilih secara purposive sampling dari kelas berbeda. Kriteria pemilihan siswa adalah pernah mengikuti layanan BK secara langsung di sekolah. Prinsip kejenuhan data (data saturation) menjadi dasar akademik penentuan jumlah informan dalam penelitian ini. Kejenuhan data menegaskan bahwa jumlah informan tidak ditentukan oleh besarnya sampel, melainkan oleh titik ketika informasi baru berhenti muncul dari informan tambahan. Dalam penelitian ini, kejenuhan tercapai setelah wawancara terhadap tiga siswa menunjukkan pola jawaban yang konsisten pada aspek kenyamanan, pemahaman, dan pengalaman layanan BK. Penambahan informan siswa dinilai tidak akan memberikan variasi data yang signifikan. Adapun satu guru BK dipilih karena posisinya sebagai satu-satunya tenaga yang menjalankan fungsi tersebut di sekolah. Guru BK ini berperan sebagai informan kunci (*key informant*) tanpa alternatif pembandingan di lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat cara yang saling melengkapi, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dokumentasi, dan angket daring berbasis Google Form. Angket disebarakan kepada 19 siswa kelas III hingga VI sebagai data kuantitatif pendukung. Instrumen wawancara disusun dalam bentuk pedoman semi-terstruktur dengan lima indikator utama. Kelima indikator tersebut meliputi: (1) pelaksanaan layanan BK sehari-hari, dan (2) ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas. Tiga indikator lainnya adalah (3) permasalahan siswa yang ditangani, (4) kendala yang dihadapi guru maupun siswa, dan (5) tingkat kenyamanan serta persepsi terhadap efektivitas layanan. Setiap indikator dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan turunan yang disesuaikan dengan posisi informan, baik sebagai guru BK maupun siswa.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diawali dengan open coding terhadap seluruh transkrip wawancara dan catatan observasi, untuk mengidentifikasi satuan makna (meaning unit). Kode-kode yang muncul kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kemiripan makna, seperti kategori fasilitas, kenyamanan, dan dukungan eksternal. Kategori-kategori tersebut selanjutnya disintesis menjadi tema besar, misalnya tema “ruang sebagai prasyarat psikologis konseling”. Tema inilah yang menjadi dasar penyajian data pada bagian hasil penelitian. Data angket dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban, untuk memperkuat gambaran umum dari data kualitatif. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari wawancara guru BK dan siswa, hasil observasi, dokumentasi, serta hasil angket. Triangulasi ini memastikan konsistensi dan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Layanan BK

Hasil wawancara dengan guru BK menunjukkan bahwa layanan BK dilaksanakan secara fleksibel dan situasional, menyesuaikan tingkat urgensi dan kerahasiaan permasalahan yang dihadapi siswa. Untuk permasalahan ringan, layanan dilakukan di ruang guru tanpa prosedur khusus. Untuk kasus yang lebih serius, layanan dipindahkan ke ruang kepala sekolah, terutama ketika diperlukan keterlibatan orang tua. Guru BK menerapkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan reaktif yang merespons permasalahan begitu muncul, dan pendekatan preventif melalui arahan serta pemodelan perilaku positif secara rutin.

Kendala Fasilitas dan Dukungan

Kendala utama yang disampaikan guru BK dikelompokkan menjadi dua sumber. Pertama, kendala fasilitas, yaitu ketiadaan ruang khusus yang memaksa pemanfaatan ruang guru dan ruang kepala sekolah secara bergantian. Akibatnya, layanan tidak memiliki tempat tetap yang menjamin kerahasiaan. Kedua, kendala dukungan eksternal, yaitu kurangnya dukungan orang tua siswa, yang kadang membela anak meskipun terbukti bersalah. Sebagai sekolah inklusi, guru BK juga menghadapi tantangan tambahan dalam menyusun strategi penanganan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Persepsi Siswa terhadap Layanan BK

Hasil wawancara dengan tiga siswa dari kelas berbeda menunjukkan pola jawaban yang konsisten. Seluruh siswa mengaku pernah mengikuti layanan BK dan mengakui manfaatnya. Persepsi siswa terhadap fungsi BK cukup beragam. Satu siswa menyebutnya sebagai “ruang interogasi”, sementara dua siswa lainnya memahami BK sebagai tempat menangani dan menyelesaikan masalah. Ketiga siswa secara konsisten menyatakan segan bercerita terbuka di ruang guru yang ramai, dan merasa takut ketika dipanggil ke ruang kepala sekolah.

Administrasi dan Pengelolaan Layanan BK

Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan satu pun ruang yang secara resmi ditetapkan sebagai ruang BK dalam struktur bangunan sekolah. Ruang guru dan ruang kepala sekolah yang digunakan bersifat darurat dan tidak permanen. Hasil dokumentasi memperkuat temuan ini: tata ruang sekolah tidak mencantumkan ruang BK, dan tidak ditemukan program BK tertulis yang tersusun secara berkala. Akibatnya, layanan yang berjalan bersifat insidental dan reaktif, tanpa kerangka kerja administratif yang dapat dievaluasi secara berkala.

Hasil Angket sebagai Data Pendukung

Angket daring disebarakan kepada 19 siswa kelas III hingga VI, terdiri atas 11 siswa yang pernah mengikuti layanan BK dan 8 siswa yang belum pernah. Hasil angket menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan wawancara, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Tema dan Temuan Penelitian

Tema	Temuan Utama
Pelaksanaan Layanan BK	Layanan dilakukan fleksibel: ruang guru untuk kasus ringan, ruang kepala sekolah untuk kasus serius; kombinasi pendekatan reaktif dan preventif.
Kendala Fasilitas dan Dukungan	Ketiadaan ruang tetap menghambat kerahasiaan dan kenyamanan; dukungan orang tua rendah; kompleksitas tambahan pada penanganan siswa berkebutuhan khusus.
Persepsi Siswa	Pemahaman siswa terhadap fungsi BK beragam (termasuk persepsi “ruang interogasi”); seluruh siswa segan bercerita di

Administrasi dan Pengelolaan	ruang guru dan takut di ruang kepala sekolah. Tidak ada ruang BK dalam tata ruang sekolah maupun program BK tertulis; layanan bersifat insidental dan reaktif, tanpa kerangka evaluasi berkala.
Hasil Angket (19 siswa)	79% takut rahasia diketahui murid lain; 79% menilai perlu bantuan guru BK; 68% menghendaki ruang khusus terpisah; 53% menyebut rasa takut/malu sebagai penghambat utama; 100% setuju perlu ruang BK baru.

Beberapa kutipan langsung dari siswa berikut menggambarkan pengalaman tersebut secara kualitatif. Siswa menyampaikan bahwa mereka merasa kurang nyaman saat berada di ruang yang tidak banyak gurunya, atau di ruang kepala sekolah karena takut dimarahi. Siswa juga menyampaikan harapan agar tersedia ruang khusus, supaya dapat bercerita tanpa takut dilihat banyak guru.

Temuan menunjukkan bahwa layanan BK tetap berjalan secara fungsional meskipun tanpa ruang khusus. Meski demikian, seluruh siswa menyatakan ketidaknyamanan ketika harus bercerita di ruang guru yang ramai. Ketika siswa merasa diawasi atau berpotensi didengar oleh pihak lain, mekanisme pertahanan diri secara psikologis akan aktif. Mekanisme ini mendorong siswa menahan informasi yang sebenarnya ingin disampaikan. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan pandangan Rogers (1957) mengenai kondisi inti hubungan konseling. Rogers menekankan bahwa kerahasiaan dan rasa aman merupakan prasyarat utama terbentuknya hubungan terapeutik yang produktif.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan dari sisi budaya sekolah dan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Budaya sekolah yang terbiasa menempatkan ruang guru sebagai ruang terbuka bagi berbagai urusan administratif membentuk norma tersendiri. Norma ini menganggap privasi bukan prioritas utama dalam tata kelola ruang, sehingga kebutuhan psikologis siswa saat konseling menjadi terabaikan secara struktural. Dari sisi karakter siswa sekolah dasar, anak pada usia ini masih sangat bergantung pada persepsi terhadap figur otoritas dan ruang fisik. Persepsi ini digunakan anak untuk menilai apakah suatu situasi aman atau mengancam. Karena itu, asosiasi ruang kepala sekolah dengan sanksi menjadi lebih kuat dibandingkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Status sekolah sebagai sekolah inklusi turut memperberat kondisi ini, karena keberagaman kebutuhan siswa menuntut fleksibilitas ruang yang justru tidak tersedia. Stigma terhadap BK yang selama ini melekat sebagai tempat “pemanggilan karena masalah” turut memperkuat keengganan siswa untuk terbuka. Tanpa ruang yang secara simbolik netral dari stigma tersebut, keterbukaan siswa akan sulit dicapai secara optimal. Temuan lain menunjukkan bahwa penggunaan ruang kepala sekolah untuk kasus yang lebih serius justru menimbulkan rasa takut, bukan rasa aman, pada siswa. Hal ini merupakan akibat dari asosiasi kognitif yang telah terbentuk dalam pengalaman siswa, di mana ruang kepala sekolah lebih sering dikaitkan dengan momen pemberian sanksi. (Saputra, 2022) menyebutkan bahwa persepsi negatif terhadap BK akibat pengalaman layanan yang tidak nyaman dapat menghambat siswa untuk datang secara sukarela. Akibatnya, layanan kehilangan fungsi preventifnya. Implikasinya, pemilihan ruang untuk layanan BK tidak dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan semata. Makna simbolik ruang tersebut turut membentuk pemaknaan siswa terhadap pengalaman konseling.

Adapun dari angket 19 siswa memperkuat pola dalam wawancara mendalam. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap ketiadaan ruang BK khusus dirasakan pula oleh siswa yang belum pernah mengikuti BK. Kekhawatiran ini bersifat antisipatif. Siswa yang

belum pernah mengikuti BK pun sudah membentuk persepsi bahwa ruang yang tidak tertutup akan membuat rahasia mereka rentan diketahui orang lain. Konsensus 100 persen siswa yang setuju terhadap pengadaan ruang BK baru menunjukkan bahwa kebutuhan ini dirasakan secara kolektif, bukan sekadar persepsi sebagian kecil siswa. Sebagai sekolah inklusi, kompleksitas penanganan siswa berkebutuhan khusus tanpa ruang yang kondusif memberikan makna tersendiri bagi kajian ini. Siswa berkebutuhan khusus umumnya lebih sensitif terhadap stimulus lingkungan, sehingga ruang yang tidak privat dapat memperbesar tingkat kecemasan mereka. (Anggara & Suherman, 2024) menambahkan bahwa efektivitas layanan BK dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas, kompetensi konselor, dan dukungan ekosistem sekolah secara menyeluruh. Ketika fasilitas tidak terpenuhi, dampaknya lebih terasa pada kelompok siswa yang memiliki kebutuhan adaptasi lebih tinggi.

Perspektif manajemen pendidikan, temuan ini relevan dikaitkan dengan prinsip Total Quality Management (TQM) dalam layanan pendidikan. Prinsip ini menekankan bahwa mutu layanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi pelaksana, tetapi juga oleh kualitas seluruh sistem pendukung, termasuk sarana dan prasarana. Ketiadaan ruang BK yang layak menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen mutu layanan BK secara normatif, dan dukungan sistem secara nyata di lapangan. Prinsip School Based Management juga relevan digunakan untuk membaca temuan ini. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan seharusnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Kewenangan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik satuan pendidikan, termasuk kebutuhan ruang BK bagi sekolah berstatus inklusi. Hal ini sejalan dengan temuan (Salwa Almaliyah & Uman Suherman, 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa optimalisasi sarana dan prasarana turut menentukan keberhasilan manajemen layanan bimbingan dan konseling di sekolah. (Tere & Herdi, 2021) menyebutkan bahwa perencanaan layanan BK yang baik harus didasarkan pada asesmen kebutuhan nyata siswa. Dalam kasus ini, kebutuhan paling mendasar yang teridentifikasi secara konsisten adalah ketersediaan ruang yang aman dan privat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan sebuah gagasan yang layak ditempatkan sebagai kontribusi konseptual utama. Gagasan tersebut adalah bahwa ruang BK bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan ruang psikologis. Ruang psikologis ini menentukan keberanian siswa untuk terbuka dan kualitas hubungan terapeutik yang terbentuk. Pemahaman ini menggeser cara pandang manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dari sekadar pemenuhan standar fisik menuju pemenuhan kebutuhan psikologis siswa. Kebutuhan psikologis ini menjadi bagian integral dari mutu layanan pendidikan di sekolah dasar, khususnya pada sekolah berstatus inklusi. Pola yang ditemukan di SD Negeri Balirejo bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Pola ini merupakan cerminan dari kondisi serupa yang banyak terjadi di sekolah dasar lain di Indonesia. Oleh karena itu, isu ini layak menjadi perhatian kolektif dalam kebijakan pendidikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan ruang yang menjamin privasi dan rasa aman siswa. Efektivitas layanan BK dipengaruhi oleh interaksi antara kompetensi guru, privasi ruang, dan dukungan manajemen sekolah. Ketiadaan salah satu unsur tersebut akan membatasi kedalaman dan kualitas layanan yang dapat diberikan. Ruang BK, dengan demikian, perlu

dipandang sebagai prasyarat psikologis bagi keberhasilan layanan, bukan sekadar kebutuhan administratif yang dapat ditunda pemenuhannya. Secara praktis, temuan ini menjadi dasar bagi sekolah dan pemangku kebijakan untuk menjadikan pengadaan ruang BK sebagai prioritas dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas ini setara dengan fasilitas pembelajaran lainnya. Hal ini terlebih penting bagi sekolah berstatus inklusi, yang menghadapi kompleksitas kebutuhan siswa lebih tinggi. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas layanan BK bersifat multidimensi. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi konseptual bahwa ruang BK merupakan ruang psikologis, bukan hanya ruang fisik, dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar inklusi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan kajian ke beberapa sekolah dasar inklusi lain. Perluasan ini diperlukan agar pola hubungan antara ketersediaan sarana BK dan efektivitas layanan dapat dipetakan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amala, A. K., & Kaltsum, H. U. (2021). Peran Guru sebagai Pelaksana Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Menanamkan Kedisiplinan Bagi Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5213–5220. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1579>
- Anggara, N., & Suherman, U. (2024). Optimalisasi Sarana dan Prasarana Melalui Kreativitas Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan dan Konseling (BK). *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 116–130. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v9i1.6245>
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia [PB ABKIN]. (2023). *Paparan kebutuhan dan kekurangan Guru Bimbingan dan Konseling di Indonesia*. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, 8 November 2023.
- Campbell, J. P. (1977). On the nature of organizational effectiveness. In P. S. Goodman & J. M. Pennings (Eds.), *New perspectives on organizational effectiveness* (pp. 13-55). Jossey-Bass.
- Fadillah, M. A., & Hanif, M. (2025). Analisis Peran Guru Kelas Dalam Menggantikan Fungsi Guru Bk Di Sekolah Dasar. *GUIDELINE: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi Pendidikan*, 1(3), 1–10. <https://journal.ycn.or.id/index.php/guideline/article/view/100>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1997). *Organizations: Behavior, structure, processes* (9th ed.). Irwin/McGraw-Hill.
- Khoeriyah, F. (2024). Studi Deskriptif Tentang Infrastruktur Manajemen Bimbingan Konseling di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 18(1), 81. <https://doi.org/10.52434/jpu.v18i1.3326>
- Mustika, D., Muji, A. P., & Iswari, M. (2022). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1481–1487. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/345/298>
- Nikmarijal, N., & Ahmad, B. (2023). Efektivitas layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 11(4), 361–368. <https://doi.org/10.29210/1111700>
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103. <https://doi.org/10.1037/h0045357>
- Salwa Almaliyah, & Uman Suherman. (2024). Peran Sarana dan Prasarana dalam Optimalisasi Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 155–165. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v9i1.6247>

- Saputra, A. D. (2022). Peran Guru Kelas Dalam Mengampu Tugas Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 389. <https://doi.org/10.35931/am.v6i2.977>
- Steers, R. M. (1977). *Organizational effectiveness: A behavioral view*. Goodyear Publishing Company.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tere, M. I., & Herdi. (2021). Asesmen Kebutuhan Sebagai Dasar Perencanaan Program Bimbingan Pribadi Berbasis Multikultural Di Sma. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v5i1.1069>